

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 4(2), 265-283.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ayu, D. P. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Bantuan sosial, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 1(1), 170-185.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Pengentasan Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diakses dari <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/infografik/kemiskinan>
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2021*.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2021*.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2021*.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2021*
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2021*
- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2021*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. *Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial*.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS DIY). (2022). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Persentase%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret,persen%20poin%20terhadap%20Maret%202021>.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Konsep/Penjelasan Teknis Tenaga Kerja*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga->

kerja.html#:~:text=Penganggur%20terbuka%2C%20terdiri%20dari%3A, merasa%20tidak%20mungkin%20mendapatkan%20pekerjaan.

Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS DIY). (2022). Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016-2021.

Bambang Sudaryana, D. E. A., Ak, M., Agusiady, H. R., & SE, M. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Deepublish.

Chambers, Robert. (1995). PRA - Participatory Rural Appraisal - Memahami Desa Secm·a Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius. Pcpep Sudradjat. Jakarta: LPJES.

Desmiarti, Sri. (2019). Pengaruh PDRB dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Langkat. Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/7404/1/SKRIPSI%20DESMI%20pdf.pdf>

Erdkhadifa, Rendra. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur dengan Pendekatan *Spatial Regression*. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol.11, No.2: 122-140.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 60 Tahun 2016.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.

Gunawan, E. (2021). Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*Vol, 1.

Iqbal, Muhammad. (2015). Regresi Data Panel (2) “Tahap Analisis”. Perbanas Institute: Education. Diakses dari <https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Prov. D.I.Y. (2020) Program Perlindungan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/data-publikasi/berita-terbaru/3036-program-perlindungan-sosial-daerah-istimewa-yogyakarta.html>

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Pilar Pembangunan Nasional. Diakses dari <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2020/10/Metadata-Pilar-Sosial-Edisi-II.pdf>

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Akuntansi Hibah.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 19 Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual.

- Maulana, R., Pitoyo, J.A., Alfana, F.A.M. (2021) Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Kondisi ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *MKG: Vol.23, No.1*.
- Melati, A. M., & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 422-430.
- Nisa, A. N. A., & Handayani, H. R. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah tahun 2012–2018. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(1). Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/29993/25013>
- Oktriwina, Seftin, A. (2022) Pengertian Pengangguran Terbuka dan 6 Penyebabnya. Diakses dari <https://glints.com/id/lowongan/pengangguran-terbuka-adalah/>
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2022). Analisis Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
- Razak, Hamied, A. (2022) Data BPS DIY: Kota Jogja Paling Banyak Pengangguran. Diakses dari <https://ekbis.harianjogja.com/read/2022/11/09/502/1117175/data-bps-diy-kota-jogja-paling-banyak-pengangguran>
- Salsabilla, A., Juliannisa, I. A., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 96-105.
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2).
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan). Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2004). Teori Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukmana, Oman. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare States*). *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1.
- Suripto, S., & Subayil, L. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Yogyakarta periode 2010-2017. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 127-143.
- Suryawati. (2004). Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Wiku, F., Rotinsulu, O.T., Walewangko, N.E. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial (PKH dan KUBE) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Minahasa Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Vol.21, No.1*.
- Yanuar. (2009). Ekonomi Makro Suatu Analisis Untuk Konteks Indonesia. Jakarta : Yayasan Mpu Ajar Artha.
- Zaini, Ahmad. (2015). Konsepsi Welfare State dalam Konstitusi Indonesia. *Al-Ahkam. Vol. 11, No 1*.